

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Manifestasi nilai-nilai Islam dalam mengelola partai politik di PKS merupakan satu-kesatuan nilai. Antara nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dengan nilai yang lain. Seperti nilai keadilan erat hubungannya dengan nilai persamaan, kebebasan, toleransi dan syuro. Kemudian nilai keseimbangan erat hubungan dengan toleransi dan persamaan.
2. Manifestasi nilai keadilan di PKS dalam mengelola partai relevan dan sudah sesuai dengan nilai politik Islam. Hal ini terlihat dari pertama, adanya kesamaan hak bagi kader untuk menjadi pimpinan di struktur partai dan menjadi calon legislatif sesuai dengan syarat-syarat yang diatur di partai. Kedua, adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam struktur, kepemimpinan dan pembagian peran yang proporsional. Bahkan prinsip keadilan di PKS adalah tonggak utama dalam menjalankan aktivitas baik di internal maupun eksternal.
3. Manifestasi nilai kebebasan di PKS dalam mengelola partai sesuai dengan nilai politik Islam. Adanya aspek al hurriyah dan jundiyyah, menunjukkan bahwa konsep kebebasan yang dimaksud adalah memilih terhadap sesuatu

yang terbaik, sedangkan aspek kebebasan ini dibentengi dengan sikap jundiyyah atau loyalitas kader terhadap sistem dan kepemimpinan.

4. Manifestasi nilai persamaan di PKS dalam mengelola partai sesuai dengan nilai politik Islam. Wujud nyata dari aspek ini adalah tingginya produktivitas kalangan perempuan dalam beraktualisasi baik di partai maupun diluar partai.
5. Manifestasi nilai musyawarah di PKS dalam mengelola partai tidak bertentangan dengan nilai politik Islam. Semangat, Model dan teknis musyawarah PKS cukup egaliter dengan mengkombinasi keberadaan Majelis syuro sebagai majelis tertinggi, kemudiaan adanya Dewan Syariah sebagai benteng dan koridor partai dalam menjalankan syariah dengan model Pemilihan Raya yang mencerminkan adanya proses akomodasi ditataran yang paling bawah.
6. Manifestasi nilai Keseimbangan di PKS dalam mengelola partai sangat sesuai dengan ajaran Islam. Keseimbangan menjadi ciri khas profile kader PKS. kader diberikan pembinaan, baik pembinaan ruhiyah maupun pembinaan duniawi.
7. Manifestasi nilai toleransi di PKS dalam mengelola partai sesuai dengan nilai politik Islam. Wujud nyata sikap toleran PKS adalah adanya anggota legislatif dari PKS yang beragama bukan Islam. Di PKS, pengurus dan kader diarahkan untuk bekerja, bergaul dan bekerjasama dengan semua elemen masyarakat.
8. Terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam menerapkan nilai-nilai Islam di PKS. Dalam aspek keadilan dan persamaan berlaku untuk semua

kader, namun keterlibatan elit dan senior dalam setiap periode kepengurusan masih sangat dominan. Sehingga proses regenerasi elit belum terlihat dinamis. Kemudian pada konsep jundiyah di PKS, konsep ini menurut peneliti, dari satu sisi positif, namun dalam sisi kebebasan dan keberanian untuk berpikir jadi sedikit terhambat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti merumuskan saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan supaya proses kaderisasi juga berdampak terhadap proses regenerasi. Hal ini dapat dilakukan dengan pembatasan jabatan pada Dewan Pengurus dan Dewan Syariah hanya untuk satu periode kepengurusan saja.
2. Peneliti melihat aspek kebebasan berpikir kader PKS belum berjalan ideal. Peneliti beranggapan bahwa terdapat keengganan dari kader sebagai *jundiyah (follower)* terhadap para seniarnya sebagai *Qiyadah (leader)*, padahal disatu sisi kader merupakan aset partai, sehingga potensi yang ada pada kader, khususnya dalam hal pemikiran sangat dibutuhkan dalam membesarkan partai. Ide-ide kader yang bagus justru dapat menjadi proses dialektika bagi partai untuk membuat terobosan baru dalam menghadapi tantangan partai yang makin berat kedepan.
3. Partai Keadilan Sejahtera harus memberikan fasilitasi lebih kepada kelompok kader perempuannya dalam meningkatkan kemampuan berpolitik, baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan, intensitas pertemuan dengan masyarakat pemilih, komunikasi politik dengan pihak luar atau

fasilitasi lainnya. Hal ini bertujuan agar keterpilihan calon legislatif dari kalangan perempuan lebih banyak lagi.